

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN DI KABUPATEN KARAWANG

Dr. H. Romi Saputra, S.Sos, M.Si

Lina Marlina Effendi, S.Pd, M.Si

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkembangan Kawasan Industri, laju pertumbuhan penduduk dan akulturasi di wilayah Kabupaten Karawang terutama dikawasan industri. Dengan rumusan masalah bagaimana perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang dilihat dari analisis urban city dalam hal ini mobilitas penduduk dan akulturasi dan; bagaimana upaya dan strategio apa yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan kawasan industry yang tidak rentan terhadap mobilisasi penduduk dan tenaga kerja serta alkulturasi.

Teori dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini diantaranya terkait dengan teori-teori kependudukan, mobilitas unsur dinas kependudukan, sekretariat daerah, tokoh masyarakat dan pelaku industry. Hasil penelitian ini adalah karawang sebagai salah satu kawasan industry terbesar di Indonesia telah melahirkan fenomena tingkat urbanisasi atau mobilitas penduduk yang tinggi baik dari luar daerah Kabupaten Karawang maupun dari desa-desa karawang. Keyataan ini telah melahirkan implikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan penduduk; angka criminal dan semakin terbatasnya sarana dan prasarana penduduk seperti perumahan dan fasilitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi berbagai implikasi negatif tersebutantara lain dengan menggas berbagai terobosan baik bersifat persuasive maupun melalui berbagai kebijakan yang terkait.

Pada akhirnya disarankan untuk dilakukan registrasi penduduk secara rutin oleh stek holder, operasi yustisi dan penyuluhan di Kabupaten Karawang sehingga bisa diidentifikasi mana penduduk yang tetap dan tidak tetap terutama di kawasan industry serta pentingnya dirumuskan kebijakan dan pengendalian khusus tentang administrasi kependudukan di kawasan industry.

Kata Kunci : Kawasan Industri; kulturasi; Kebijakan; Mobilitas.

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of the development of Industrial Estates, the rate of population growth and acculturation in the Karawang regency, especially in the industrial estates. With the formulation of the problem of how the development of industrial estates in Karawang regency can be seen from the analysis of urban citi in this case population mobility and accuracy and; what efforts and strategies carried out by the Karawang regency government in developing industrial estates that are not vulnerable to population and labor mobilization as well as acculturation.

Theories and approaches used in analyzing the results of this study are related to population theories, mobility of elements of the population service, regional secretariat, community leaders and industry players. The results of this study are that Karawang as one of the largest industrial areas in Indonesia has given rise to the phenomenon of high levels of urbanization or population mobility both from outside the Karawang regency and from karawang villages. This keyataan has

given rise to implications for the rapid rate of population growth; criminal rate and the increasingly limited facilities and infrastructure of the population such as housing and other facilities. The Karawang regency government has issued a policy to overcome the negative implications, among others, by gassing various breakthroughs both persuasive and through various related policies.

In the end, it is recommended to conduct routine population registration by cuttings holders, justice operations and counseling in Karawang Regency so that permanent and non-permanent residents, especially in industrial areas, are identified as well as the importance of formulating specific policies and controls regarding population administration in industrial estates.

Keywords: Cultivation; Industrial Estate; Mobility; Policy

PENDAHULUAN

Kawasan industri merupakan suatu wilayah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum¹. Pengembangan kawasan industri di Indonesia telah berkembang pesat yang diawali pada tahun 1970an sebagai suatu usaha untuk memenuhi kegiatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pengembangan kawasan industri penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi satu persen saja dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang². Kebijakan pengembangan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, dan ini

merupakan landasan awal langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Diantara berbagai daerah yang merupakan kawasan industri, Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara (19.000 Ha), untuk saat ini terdapat kawasan industri yang sudah beroperasi. Kawasan industri sudah ditempati oleh berbagai macam perusahaan baik nasional ataupun internasional dan sudah menyerap ribuan pekerja, menurut data yang ada di Kabupaten Karawang terdapat Kawasan Industri Indotaisei; Kawasan Industri KIIC; Kawasan Industri Mitra Karawang; Kawasan Industri PT. Timor Putra Nasional dan Kawasan Industri Surya Cipta³. Sejatinya di daerah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan industrialisasi disisi lain tentunya dapat melahirkan implikasi yang tidak begitu menguntungkan mengingat secara ekonomi, mobilitas penduduk dipandang sebagai mobilitas geografis tenaga kerja, yang merupakan

¹Dirdjojuwono, Roestanto W, 2004, Kawasan Industri Indonesia – Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya, Bogor: Wirausahamuda.

² Soeling 2007, Pertumbuhan ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Birokrasi Bisnis

³ Disarikan dari BPS Kabupaten Karawang, 2016

respon terhadap ketidakseimbangan distribusi keuangan lahan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya alam. Ketidakseimbangan lokasi geografis faktor produksi tersebut pada gilirannya mempengaruhi arah dan volume migrasi.

Kegiatan mobilitas pedesaan-perkotaan memiliki dampak positif baik pada rumah tangga pedesaan pendapatan dan pembangunan ekonomi pedesaan Total pendapatan rumah tangga secara signifikan dipengaruhi oleh pengiriman uang (remitan) sementara pendapatan rumah tangga berasal dari kegiatan migrasi adalah signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga yang bermigrasi.

Mobilitas bagi sebagian orang merupakan salah satu strategi dari rumah tangga pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan untuk membuat dan meningkatkan pendapatan mereka. Alasan mengapa mobilitas kecenderungan bergerak maju ke daerah perkotaan karena kondisi ekonomi daerah pedesaan tidak menjawab permintaan hidup masyarakat. Hal ini juga karena daerah perkotaan seperti halnya kawasan industri di Kabupaten karawang menawarkan lebih menjanjikan dan berkembang sektor informal seperti *merchandising* tersebut. Menurut Connel bahwa di negara-negara sedang berkembang terdapat hubungan yang sangat erat antara migran dengan daerah asalnya, dan hal tersebutlah yang memunculkan fenomena tersebut. Mobilitas yang terjadi di negara-negara sedang berkembang dipandang memiliki efek yang sama. Namun, terdapat fenomena khusus dari mobilitas di negara-negara ini, yang diperkirakan lebih

mempercepat pemerataan pembangunan⁴. Fenomena tersebut berbentuk transfer pendapatan ke daerah asal (baik berupa uang ataupun barang), yang dalam teori mobilitas dikenal dengan istilah remitan (*remittance*). Begitu juga dengan akulturasi yang senyatanya dapat muncul manakala pengembangan kawasan industri dilakukan di sebuah wilayah. Akulturasi merupakan salah bentuk proses sosial, erat kaitannya dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Sebagai akibat pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak saling mempengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka mengalami perubahan bentuk. Sedangkan menurut Purwanto, menyatakan bahwa "Ruang lingkup perubahan kebudayaan yang dapat dikatakan sebagai suatu akulturasi, harus ditandai oleh keterkaitan dari *two or more autonomous cultural system*⁵. Perubahan yang bersifat akulturasi, dapat disebabkan sebagai akibat *direct cultural transmissions*, dan mungkin juga dapat disebabkan oleh kasus-kasus nonkultural seperti ekologis, demografis, modifikasi sebagai akibat pergeseran kebudayaan, juga karena keterlambatan kebudayaan dan efek dari industrialisasi seperti yang kemudian dilanjutkan dengan *internal adjustment* setelah *traits* atau pola-pola suatu kebudayaan asing yang diterima. Selain itu, suatu akulturasi dapat pula disebabkan oleh suatu reaksi adaptasi bentuk bentuk kehidupan yang tradisional. Semuanya itu

⁴Connel, J.J. 1995. Control of Fish Quality. Fourth Edition. Fishing New Books. The University Press

⁵Purwanto, M. Ngalim. 2000. Psikologi Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya

dapat dilihat sebagai dinamika dalam rangka adaptasi yang selektif terhadap sistem nilai, suatu proses integrasi dan differensiasi; yaitu sebagai akibat perkembangan generasi, dan faktor bekerjanya peranan dari determinan dan suatu kepribadian tertentu.

Indikasi munculnya implikasi pengembangan kawasan industri di karawang semakin jelas manakala berdasarkan observasi awal bahwa di beberapa desa yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Karawang mengungkapkan bahwa dampak mobilitas tenaga kerja antarsektor pekerjaan terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat memperlihatkan sisi positif dan negatif. Pada sisi positif, perilaku mobilitas baik di lingkungan wilayah desa maupun bergerak keluar lingkungan mereka, telah banyak menyokong jumlah penawaran tenaga kerja yang terbatas di pedesaan. Peluang kerja yang tercipta dan atau yang terpaksa diciptakan, tidak lain adalah untuk melangsungkan perekonomian mereka. Pada sisi ini, masyarakat mampu secara aktif membuka peluang usaha baru atau meneruskan peluang usaha yang telah ada menjadi satu basis perekonomian penting bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, mobilitas tenaga kerja dapat berperan positif dalam menyeimbangkan keterbatasan daya dukung lahan pertanian dengan peluang sektor ekonomi lain bagi warga.

Mobilitas tenaga kerja tampaknya juga mempunyai sisi negatif. Kecenderungan warga, khususnya tenaga kerja yang melakukan migrasi keluar daerah, terutama ke kota-kota besar menjadi tidak terkendali. Secara implisit, migrasi tenaga kerja ke kota

besar akan membawa pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian desa akan berkurang dan bahkan mungkin menghilang. Sementara itu, kehadiran tenaga kerja dari wilayah perdesaan ke kota-kota besar secara tidak langsung pula akan membawa dampak kehidupan sosial perkotaan yang cukup penting. Masuknya sebagian besar tenaga kerja ke dalam sektor-sektor informal pekerjaan di perkotaan kadang-kadang membawa persoalan sosial ekonomi dan politik yang cukup pelik. Apabila tidak diantisipasi secara dini, hal tersebut tentunya akan membawa implikasi sosio kultural yang lebih jauh.

Beberapa referensi mengungkapkan bahwa gaya hidup dan pandangan tenaga kerja sekarang ini yang umumnya telah bekerja di kota, sebagian besar cenderung negatif. Ada beberapa contoh yang menunjukkan ciri-ciri tersebut, yaitu gaya hidup dalam bertutur sapa dengan orang tua maupun sesamanya cenderung berubah, gaya hidup dalam berpakaian yang cenderung lebih modern dan terbuka, gaya hidup dalam makan dan minum (sebagian mengenal dengan jelas minuman beralkohol), pandangan terhadap sektor pekerjaan di pedesaan yang dianggap rendah dan sebagainya. Pernyataan terakhir ini yang banyak meracuni tenaga kerja lain untuk menjadi pengangguran di desa daripada bekerja sebagai buruh dan lain-lain pekerjaan sejenis. Mereka lebih senang mengharapkan datangnya kesempatan keluar daerah (migrasi) dan mengisi peluang kerja

di perkotaan, apabila sektor formal (termasuk sebagai buruh pabrik), tidak bisa menampung sehubungan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang rendah. Perubahan gaya hidup tersebut disebabkan oleh pengaruh kehidupan kota yang serba modern dan merendahkan nilai-nilai lama (tradisional). Indikasi ini menyiratkan lebih lanjut, bahwa walaupun desa-desa yang diamati bisa dikatakan “semi-kota” dan dekat dengan ibukota negara tetapi masih ada anggapan daerahnya adalah daerah perdesaan yang masih tertinggal dibanding kota Jakarta.

Mengalir dari latar belakang tersebut, kami tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai persoalan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawan dan menganalisisnya melalui teori dan konsep yang relevan yakni urban city dan akulturasi. Karena memang implikasi yang nyata dari pengembangan kawasan industri secara teoritis adalah pada aspek mobilisasi penduduk, tenaga kerja dan akulturasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kawasan Industri

Kawasan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pengertian kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1989 yang dimaksud dengan *kawasan industri* adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Secara konseptual Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan (*manufacture*) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang disediakan oleh badan pengelola (pemerintah/swasta), sehingga para investor atau pengusaha akan memiliki semangat untuk memasukkan modalnya di sektor industri. Dengan ketersediaan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang memadai, akan menghasilkan efisiensi ekonomi dalam berinvestasi (mendirikan pabrik dan industri) dibandingkan setiap investor harus menyediakan sendiri fasilitas tersebut. Selanjutnya Unido mendefinisikan bahwa Kawasan Industri (*Industrial Estates*) adalah sebidang lahan yang dipetak-petak sedemikian rupa sesuai dengan rancangan menyeluruh, dilengkapi dengan jalan, kemudahan-kemudahan umum (*public utilities*) dengan atau tanpa bangunan pabrik, yang diperuntukkan bagi pengarahannya industri dan dikelola secara khusus (full timer)⁶. Dalam kawasan Industri akan dibagi menjadi zona industri dan area industri. Dalam kawasan industri, zona industri dan area industri terbagi 3 (tiga) unsur utama kegiatan produksi yaitu : (a) modal (investasi); (b) tenaga kerja (wiraswasta) ; (C) pengusaha (wiraswasta) di bidang investasi; ketiganya dapat mengubah struktur ekonomi daerah menjadi lebih industrial dan produktif⁷

⁶Evaluation of Transfer of Technology Agreements, *UNIDO*, New York.

⁷Ibid15

2. *Urban City*

Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. Sebuah kota tidak hanya merupakan pemukiman khusus tetapi merupakan suatu kekompleksan yang khusus dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing, sedangkan perkotaan adalah suatu perkembangan kota yang melibatkan seluruh elemen-elemen di dalamnya yang menyangkut kota itu sendiri. Kota merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang paling rumit dan muskil sepanjang peradaban.

Definisi kota yang sering kita dengar ialah tempat kegiatan masyarakat yang sangat kompleks, telah mengalami proses interelasi antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya, jawaban ini tidak selalu benar karena tergantung pada sudut pandang seseorang dan bidang ilmunya. Tetapi merujuk pada pendapat Amos Rapoport bahwa kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Amos

Rapoport mengutip Jorge E. Hardoy⁸ untuk merumuskan kota sebagai berikut :

1. ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat,
2. bersifat permanen,
3. kepadatan minimum terhadap massa dan tempat,
4. struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata,
5. tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja,
6. fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama,
7. heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakat
8. pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas,
9. pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat,
10. pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada massa dan tempat itu.

Pengertian klasik diatas menurut Amos Rapoport tidak sesuai dengan keadaan sekarang karena hanya cocok dengan kota-kota di Eropa. Oleh sebab itu, Amos menuntun ke arah suatu pemahaman tentang kota yang dapat diterapkan pada daerah

⁸Disarikan dari buku House Form and Culture. Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall

permukiman dimana saja yaitu sebuah permukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota bukan dari segi ciri-ciri morfologis tertentu, atau kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan hirarki-hirarki tertentu.

Kota menurut Alan S. Burger "The City" yang diterjemahkan oleh Dyayadi⁹, Kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya. Menurut Bintarto¹⁰, bahwa Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

Sedangkan Kota menurut Kostof adalah tujuan dan kenangan terakhir dari perjuangan dan kemuliaan kita. ia adalah dimana kebanggaan dari masa lalu untuk dipamerkan¹¹. Menurut ahli hukum dari

Denmark JJA Worsaae bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tetapi mau berpaling ke masa lampau untuk menyimak perjalanan yang dilaluinya¹². Hal senada dengan ungkapan Bung Karno Jasmerah, jangan melupakan sejarah. Dalam pemahaman ini, kita harus lebih arif dalam merencanakan kota dengan melihat tatanan perkembangan kota dari bentuk dan struktur kota pada masa lalu sebagai pedoman merencanakan kota secara utuh pada masa kini dan mendatang.

Selanjutnya John Brickerhoff Jackson berpendapat bahwa kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti bangunan, jalan dan ruang terbuka hijau. Kota dalam pengertian administrasi pemerintah diartikan suatu bentuk pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Wilayah kota secara administratif tidak selalu semuanya berupa daerah terbangun perkotaan (urban), tetapi umumnya juga masih mempunyai bagian wilayah yang berciri pedesaan (rural)¹³.

Kemudian Arnold Tonybee menyatakan Sebuah kota tidak hanya merupakan permukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomplekan yang khusus dan setiap kota

⁹dalam bukunya Tata Kota menurut Islam adalah suatu permukiman yang menetap (permanen) dengan penduduk yang heterogen

¹⁰Bintarto. 1989. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Penerbit Ghalia. Indonesia: Jakarta

¹¹Kostof, Spiro. 1992. The City Assembled. Thames and hudson. London. Kota menurut Alan S.Burger "The City" yang diterjemahkan oleh (Dyayadi, 2008) dalam bukunya Tata Kota menurut Islam adalah suatu

permukiman yang menetap (permanen) dengan penduduk yang heterogen, dimana di kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya

¹²Dalam Danisworo, M. (2002). Dalam <http://ml.scribd.com/doc/39085881/Revitalisas>

¹³Dalam buku Founding Vernacular Landscape

menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing¹⁴.

Kota menurut Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian Kota menurut Ditjen Cipta Karya (1997) adalah merupakan permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.

Kota juga disebut sebagai suatu ekosistem karena di kota hidup berbagai masyarakat yang struktur, kelas dan status sosial yang berbeda. Kota juga tidak dapat diklaim sebagai milik para arsitek yang menginginkan gedung-gedung indah dan berbagai real estate; atau milik ekonom yang menginginkan berdirinya mall, plaza dan supermarket; atau milik para rimbawan yang menginginkan adanya Green City. Kota adalah milik kita bersama yang harus kita jaga, kita rawat, serta kita bangun dan pelihara.

Selanjutnya pengertian kota ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek geografis, fisik, demografis, statistik, sosial,

ekonomi, dan administrasi. Pengertian ini merupakan rumusan dari Nia K. Pontoh dan Iwan Kustiawan¹⁵. Pengertian kota ditinjau dari aspek fisik adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Aspek demografis adalah wilayah dengan konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan wilayah sekitarnya. Aspek sosial adalah suatu wilayah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang heterogen. Aspek geografis adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun yang lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Aspek statistik adalah suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk criteria kota. Aspek ekonomi adalah suatu wilayah yang memiliki kegiatan usaha sangat beragam dengan dominasi di sektor nonpertanian seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, pengangkutan, dll. Dan yang terakhir kota ditinjau dari aspek administrasi adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Pengertian kota dan daerah perkotaan dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu kota untuk city dan daerah perkotaan untuk "urban". Pengertian city diidentikkan dengan kota, sedangkan urban berupa suatu daerah yang memiliki suasana

¹⁴Pada *Arnold Toynbee*, *Civilization on Trial*, dalam Somervell (ed), *Western Civilization*, Nottingham: International University Society, ad.1999

¹⁵Pada *Pontoh, Nia K & Kustiawan, Iwan*. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Penerbit ITB

kehidupan dan penghidupan modern, dapat disebut daerah perkotaan.

Mobilisasi Penduduk

Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Mobilitas penduduk horizontal atau sering pula disebut mobilitas penduduk geografis adalah gerak (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (*space and time concept*). Pada umumnya batas wilayah yang dipergunakan adalah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau pedukuhan¹⁶.

Selanjutnya mobilisasi juga merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Lawan kata dari mobilisasi adalah demobilisasi. Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi. dikenakan terhadap warga negara, sumber daya alam, sumber

daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.

Mobilisasi dalam sejarah adalah tindakan mengumpulkan dan membentuk pasukan dan suplai untuk persiapan perang. Rencana mobilisasi yang rumit merupakan salah satu sebab Perang Dunia I, karena pada tahun 1914, berdasarkan hukum dan kebiasaan perang pada masa itu, mobilisasi umum dari kekuatan militer suatu negara dianggap sebagai pernyataan perang.

Mobilisasi atau kemampuan seseorang untuk bergerak bebas merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Tujuan mobilisasi adalah memenuhi kebutuhan dasar (termasuk melakukan aktifitas hidup sehari-hari dan aktifitas rekreasi), mempertahankan diri (melindungi diri dari trauma), mempertahankan konsep diri, mengekspresikan emosi dengan gerakan tangan non verbal. Mobilisasi dan immobilisasi berada pada suatu rentang. Immobilisasi dapat berbentuk tirah baring yang bertujuan mengurangi aktivitas fisik dan kebutuhan oksigen tubuh, mengurangi nyeri, dan untuk mengembalikan kekuatan. Individu normal yang mengalami tirah baring akan kehilangan kekuatan otot rata-rata 3% sehari (*atropi disuse*)

Potter & Perry menyatakan bahwa Mobilisasi adalah kondisi dimana dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Kemudian Kozier juga mengartikan bahwa Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sehat

¹⁶Bagoes *Mantra*, Ida. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

menuju kemandirian dan mobilisasi yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk bergerak dengan bebas.

Sehingga Mobilitas atau mobilisasi merupakan kemampuan individu secara bebas, mudah, dan teratur untuk bergerak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Adapun Tujuan Mobilisasi adalah memenuhi kebutuhan dasar (termasuk melakukan aktifitas hidup sehari-hari dan aktifitas rekreasi), mempertahankan diri (melindungi diri dari trauma), mempertahankan konsep diri, mengekspresikan emosi dengan gerakan tangan non verbal.

Jenis- jenis Mobilisasi

- 1) Mobilisasi Penuh Merupakan keadaan dimana kemampuan seseorang untuk secara penuh dan bebas bergerak sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Mobilitas penuh ini merupakan fungsi dan saraf motoris, volunter dan sensoris untuk dapat mengontrol seluruh area tubuh seseorang.
- 2) Mobilisasi sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan yang jelas dan tidak mampu bergerak secara bebas dipengaruhi oleh gangguan syaraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya.

Faktor- faktor yang mempengaruhi mobilisasi :

Gaya hidup

Perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas seseorang karena gaya hidup berdampak pada perilaku/kebiasaan sehari-hari

1. Proses penyakit/cedera
Proses penyakit mempengaruhi mobilitas seseorang karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh.
2. Kebudayaan
Orang yang memiliki budaya sering berjalan jauh memiliki kemampuan mobilitas yang kuat
3. Tingkat energi
Energi adalah sumber untuk melakukan mobilitas. agar dapat melakukan mobilitas dengan baik perlu energi yang cukup
4. Usia dan status perkembangan
Kemampuan mobilitas berbeda pada tingkat usia, karena kemampuan dan kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan usia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai wilayah di Indonesia mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar ruang.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat

permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara disebut mobilitas penduduk non permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wilayah satu ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Ada kalanya mereka berpindah untuk sementara waktu baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan mobilitas penduduk non permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi.

a. **Komutasi**

Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Bentuk mobilitas penduduk ini dikenal juga dengan istilah nglaju atau ulang-alik atau pergi-pulang. Orang yang melakukan komutasi disebut komuter atau penglaju. Biasanya pada pagi hari banyak penduduk yang tinggal di daerah pinggiran kota melakukan mobilitas ke pusat kota untuk bekerja. Pada sore atau malam hari, penduduk tersebut pulang. Pada mobilitas komutasi tanpa menginap di tempat yang dituju atau dengan kata lain waktu yang digunakan kurang dari 24 jam. Pagi hari mereka berangkat ke tempat yang dituju dan pada sore atau malam hari, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Sebagai contoh banyak penduduk dari daerah sekitar Jakarta tinggal di wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Pada pagi hari penduduk dari wilayah sekitar Jakarta berangkat bekerja

ke Jakarta dan sore atau malam harinya mereka kembali.

b. **Sirkulasi**

Sirkulasi adalah mobilitas penduduk sementara ada juga yang melakukannya dengan menginap di tempat tujuan atau sering disebut mobilitas non permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda, ada yang hanya beberapa hari, dan ada yang memakan waktu lama.

- a. Mereka tidak pulang pada hari yang sama tetapi harus menginap di tempat tujuan. Hal ini dilakukan umumnya karena jauhnya jarak untuk pulang ke daerah asalnya dan atau untuk menghemat biaya perjalanan dan sejumlah alasan lainnya. Banyak penduduk desa yang bekerja di kota tidak kembali pada hari yang sama tetapi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian.

c. **Migrasi Penduduk**

Migrasi Penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi.

d. **Urbanisasi atau Migrasi penduduk desa-kota**

Urbanisasi

Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi ketika ada ketimpangan pembangunan

antara desa dengan kota. Akibatnya penduduk desa banyak yang tertarik untuk pindah ke kota dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkannya

Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Orang yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Transmigrasi adalah bentuk migrasi penduduk yang khas Indonesia. Di Indonesia transmigrasi dilakukan oleh pemerintah karena makin besarnya jumlah penduduk di wilayah tertentu, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, penduduk di luar Jawa masih sedikit dan lahannya masih sangat luas.

Jadi urban city disini adalah suatu tempat yang secara fisik memiliki sarana dan prasarana lengkap, berpenduduk banyak dan memiliki spesialisasi pembagian wilayah yang masyarakatnya bersifat kota, seperti masyarakat yang dinamis, efektif dan efisien

4. Akulturasi

Salah satu jenis lain yang memiliki ciri yang khusus dalam rangka kontak kebudayaan, adalah akulturasi. Definisi akulturasi yang sistematis, pertama kali dikemukakan oleh Redfield, Linton dan Herskovits yaitu: “*Acculturation comprehends these phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both*

groups”¹⁷.

Dalam perkembangannya definisi akulturasi tersebut banyak mendapat kritikan para antropolog pada saat itu, hal ini karena ada beberapa poin menurut mereka sangat sulit untuk ditafsirkan yaitu: (1) apa sebenarnya pengertian “*continuous first-hand contact*”; (2) apa pengertian dari “*groups of individuals*”; (3) bagaimanakah hubungan antara akulturasi dengan konsep perubahan kebudayaan dan difusi; (4) bagaimanakah hubungan antara akulturasi dan asimilasi; dan (5) apakah akulturasi sebagai suatu proses ataukah menunjukkan pada suatu keadaan (*a process or a condition*)¹⁸

Sebagai ilustrasi sulitnya menafsirkan definisi akulturasi tersebut menurut para antropolog ketika berhadapan dengan berbagai masalah yang bermunculan, yang mencolok adalah modifikasi kebudayaan yang muncul sebagai akibat kontak yang berlangsung hanya sebentar-sebentar, misalnya yang terjadi di kalangan kaum misionaris atau pedagang. Dalam beberapa kasus mereka ini dapat dianggap sebagai pembawa kebudayaan lain. Sekalipun ada kesulitan untuk dapat dimasukkan sebagai fenomena akulturasi, agaknya kasus tadi bisa dimasukkan dalam ruang lingkup studi mengenai perubahan kebudayaan. Kesulitan dalam melihat kasus tadi sama dengan kesulitan dalam membedakan antara akulturasi dengan difusi. Sekalipun demikian, baik akulturasi maupun difusi, dapat mewakili suatu perubahan kebudayaan, yaitu sebagai jawaban atas

¹⁷ Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M.J. 1936. Memorandum on The Study of Acculturation. *American Anthropologist*, 38, 149-152

¹⁸Ibid10

terjadinya penyebaran (*transmission*) kebudayaan di kalangan kelompok-kelompok. Dalam hubungan itu bahwa dalam memecahkan masalah itu, lebih mendasarkan atas pertimbangan bahwa difusi adalah suatu penyebaran kebudayaan yang telah terjadi *to be achieved cultural transmission*; sedangkan akulturasi adalah proses penyebaran kebudayaan *is cultural transmission in process*.

Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan : bahwa akulturasi atau *culture contact*, mempunyai berbagai arti diantara para sarjana antropologi, tetapi semua sepakat bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Pendapat Koentjaraningrat tersebut memberi pemahaman bahwa akulturasi merupakan proses sosial untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan sendiri tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Haviland¹⁹ tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Substitusi*, ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa unsure atau kompleks unsure-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya diganti dengan unsure-unsur baru yang memenuhi

fungsinya, yang melibatkan perubahan structural dalam tingkat yang lebih kecil.

2. *Sinkretisme*, ialah istilah untuk menunjukkan adanya unsur-unsur lama bercampur dengan yang baru dan membentuk sebuah sistem baru. Dalam hal ini kemungkinan terjadi adanya perubahan yang berarti.
3. *Adisi*, yaitu istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, dimana unsure atau kompleks unsure-unsur baru ditambahkan pada yang lama. Dalam hal ini mungkin terjadi atau tidak terjadi adanya perubahan struktural.
4. *Dekulturasi*, ialah istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, dimana bagian substansi sebuah kebudayaan mungkin hilang.
5. *Orijinasi*, ialah istilah untuk menunjukkan tingkat perpaduan kebudayaan, dimana ada unsure-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi.
6. *Penolakan*, ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi dimana perubahan mungkin terjadi begitupun cepat, sehingga sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan penolakan total, pemberontakan, atau kebangkitan.

Pada akhirnya Koentjaraningrat mengemukakan bahwa akulturasi ialah suatu proses sosial yang terjadi jika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Syarat terjadinya suatu proses

¹⁹A *Haviland*, William. Antropologi. Jakarta: Erlangga, 1993

akulturasi yaitu adanya persenyawaan (*affinity*) yakni penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman (*homogeneity*) seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya²⁰

Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2018

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini Menggunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif, dimana metode ini berusaha menganalisis *urban city* dan akulturasi dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang²¹. dan Triangulasi, yakni *Cross Check* atau pemeriksaan silang antara data, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan

²⁰Koentjaraningrat. (1990). Ritus Peralihan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

²¹Creswell, John W. 2009. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif,. Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad. Fawaid

akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu bahwa metode penelitian dipilih karena memiliki karakteristik :

- a. Perlu memahami fenomena karena sedikitnya penelitian yang membahas fenomena tersebut, sehingga konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu;
- b. Tidak mengetahui bagaimana menguji variable-variabel, dengan pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu;
- c. Topik yang baru dan tidak pernah dibahas dengan sampel atau kelompok tertentu, sehingga muncul kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori; dan
- d. Hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif.

Sumber data

1. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.
2. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *Purposive*, bahwa *Purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam penelitian-penelitian kualitatif

sampling yang *Purposive*²². Sehingga subyek penelitian terdiri dari:

Daftar Informan/Narasumber

- 1. Bupati Karawang = 1
- 2. Bapeda = 1
- 3. Industri = 5
- 4. Tokoh Masyarakat Urban = 5
- 5. Para Camat = 10

Terperinci atau mendalam tentang menganalisis *urban city* dan akulturasi dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Tabel 3.1.

Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Instrumen	Informan/Nara Sumber
1	Urban City	Penduduknya besar	1. Sekda 2. Bapeda 3. Disdukcapil
		Struktur dan tata ruang perkotaan	1. Bapeda 2. Pelaku Industri
	Fungsi perkotaan minimum yang diperinci	1. Bapeda	
	Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakat	1. Bupati 2. Tokoh Masyarakat	
	Pusat ekonomi perkotaan untuk pemasaran yang lebih luas	1. Bapeda 2. Pelaku Industri	
	Pusat pelayanan bagi daerah-	1. Bapeda 2. Tokoh	

²²bid 5

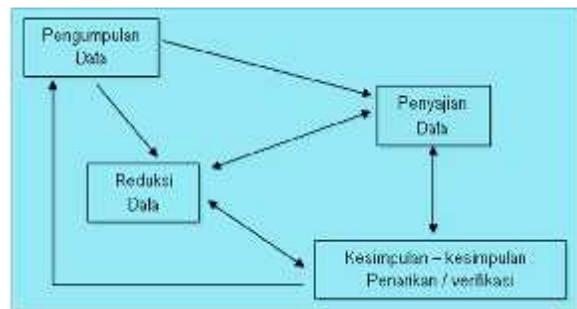
		daerah lingkungan setempat	Masyarakat
		Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada massa dan tempat itu.	1. Sekda 2. Bapeda 3. Tokoh Masyarakat 4. Pelaku Industri
2	Akulturasi	Persenyawaan	1. Sekda 2. Tokoh Masyarakat 3. Para Camat
		Keseragaman	1. Sekda 2. Tokoh Masyarakat

Sumber : diolah dari berbagai sumber , 2018

Yang menjadi Obyek penelitian ini adalah Analisis urban city dan akulturasi dalam pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Karawang,, data dan dokumen tentangurban city dan akulturasi dalam pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Karawang,dengan melibatkan:

- a. Unsur pemerintah.
- b. Unsur Industri
- c. Tokoh masyarakat.

Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif



HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan kawasan industri di kabupaten Karawang dilihat dari analisis urban city dalam hal ini mobilitas penduduk dan akulturasi

Pengembangan Karawang New Industry City (KNIC) dapat menjadi momentum untuk pembangunan kawasan industri baru berkelas dunia yang mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan di Karawang. Kawasan industri memegang peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan industri di suatu wilayah karena memberikan beberapa keuntungan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Himpunan terkait dengan Kawasan Industri, setidaknya terdapat 25 kawasan industri di Provinsi Jawa Barat dengan rencana penggunaan lahan sekitar 12.500 ha. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat berinvestasi pada sektor industri di Provinsi Jawa Barat terutama didorong oleh banyaknya kawasan industri dengan ketersediaan infrastruktur penunjang industri yang memadai²³.

Data Badan Pusat Statistik mencatat PDRB Kabupaten Karawang hanya terpaut sedikit di bawah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. PDRB Karawang Atas Harga Berlaku pada 2016 tercatat Rp 182,7 triliun atau setara 11% dari total PDRB Jawa Barat sebesar Rp 1.652 triliun. Adapun penyumbang tertinggi PDRB Karawang adalah sektor industri pengolahan — notabene berada di berbagai kawasan

industri— sebesar Rp 130,7 triliun atau setara 71,5% dari total produk domestik daerah. Keberadaan KNIC sebagai kota industri terintegrasi diharapkan akan turut mendorong pengembangan industri di daerah²⁴.

Banyak masyarakat bermigrasi dan terjadilah mobilisasi penduduk, beberapa faktor yang menyebabkan karawang sebagai tujuan urbanisasi masyarakat seluruh Indonesia :

- a. Banyaknya perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan.
- b. Tersedianya pendidikan yang lebih baik.
- c. Upah minimum kabupaten Karawang merupakan yang tertinggi se-Indonesia saat ini.
- d. Kebutuhan hidup mudah didapat.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan urbanisasi sebagai suatu proses terbentuknya kehidupan pedesaan, dalam konteks ekonomi, sosial dan mentalitas masyarakatnya Jakobson dan Prakah seperti dikutip Nazril menyebutkan bahwa urbanisasi adalah suatu gejala yang menunjukkan suatu proses perubahan tempat tinggal penduduk yang didorong oleh suatu kondisi kemasyarakatan dalam arti luas. Pada umumnya urbanisasi dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan ekonomi dan sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang tak dapat dicegah²⁵

²³ Hasil Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Karaang, Mei 2018

²⁴<http://regional.kontan.co.id/news/pengembangan-karawang-new-industry-city-dimulai> di unduh tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.30

²⁵Nazril, 2008: 51

Urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengadu nasib dikota dan bertujuan untuk mencapai satu tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Urbanisasi mempunyai hubungan yang rapat dengan industrilisasi dan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Industrilisasi merujuk kepada perubahan dalam sektor ekonomi sesebuah negara yaitu perubahan kegiatan ekonomi dari kegiatan yang berasaskan sumber pertanian kepada sektor pembuatan barang-barang. Urbanisasi yang terjadi di Teluk Jame, Kabupaten Karawang tidak terlepas dengan pembangunan industri pabrik. Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Arbi Sanit, menyebutnya dalam konteks ke-Indonesia-an harapan diatas diwujudkan dengan kata adil dan makmur. Dalam konteks ini tentu saja setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan. Dan perubahan itu adalah sebuah proses, usaha yang diarahkan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan diatas. Dengan demikian proses atau usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yakni usaha memanusiaikan manusia.

Pada tataran ini manusia menjadi fokus sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Pembangunan merupakan suatu konsep politik-ekonomi-sosial untuk mengarahkan proses perubahan yang melanda seluruh dunia kearah yang diinginkan oleh suatu bangsa (melalui undang-undang dasar, perwakilan danpemerintahannya). Dalam proses pembangunan semua pemikiran, teknologi,

ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk memajukan suatu bangsa.

Banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke daerah Karawang tersebut dikarenakan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menjanjikan juga menjadi salah satu daya tarik orang melakukan urbanisasi dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian keluarganya. Sedangkan didaerah pedesaan lapangan pekerjaannya sangat terbatas dan seandainya ada penghasilan yang diperoleh untuk bekerja di desa tidak sebesar dengan penghasilan yang didapat bekerja di kota.

Pada hakikatnya urbanisasi atau mobilisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Perubahan perilaku sosial masyarakat merupakan masalah yang sedang di hadapi oleh daerah Karawang merupakan Perubahan perilaku sosial yang cenderung negatif yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Perilaku negatif merupakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan segala perbuatan yang secara langsung berhubungan atau dihubungkan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat tetapi perilaku disini adalah perilaku yang

melanggar nilai agama. Dalam perubahan perilaku sosial yang terjadi di masyarakat antara lain berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba dan bahkan sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar hamil di luar nikah. Dalam permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat diakibatkan banyaknya orang yang melakukan urbanisasi ke daerah tersebut, sebagian pendatang mengajak masyarakat yang ada di daerah setempat untuk melakukan hal-hal yang mengacu kepada perilaku negatif, padahal sebelum urbanisasi terjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak separah sekarang²⁶.

Urbanisasi menimbulkan berbagai akibat (dampak) tertentu yang dirasakan oleh daerah penerima dan daerah yang ditinggalkan meskipun urbanisasi ini oleh sebagian ahli, dianggap membawa dampak positif terutama bagi perkembangan kota, tetapi tidak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Bagi mereka yang memandang urbanisasi membawa dampak positif mengatakan, antara lain :

1. Urbanisasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
2. Urbanisasi merupakan suatu cara untuk menyerap pengetahuan dan kemajuan-kemajuan yang ada di kota
3. Urbanisasi yang menyebabkan terjadinya perkembangan kota, selanjutnya memberikan getaran (resonansi) perkembangan bagi daerah-daerah perdesaan sekitarnya.

Dampak positif dan dampak negatif, dampak negatif itu dirasakan oleh daerah perkotaan juga dirasakan pula oleh daerah perdesaan. Urbanisasi di kota dapat menimbulkan masalah “*over urbanization*” dan “*urban primacy* “. *Over urbanization*” yaitu kelebihan penduduk sehingga melebihi daya tampung kota. Ini merupakan gejala makin meningkatnya daya tarik kota besar yang menimbulkan *dysfunctional condition*. Hal ini dapat dilihat dengan ketimpangan antar daerah dan semakin beratnya beban pemerintah kota. Sedangkan *urban primacy* adalah timbulnya dominasi kota besar terhadap kota-kota kecil sehingga tidak berkembang, dominasi tersebut dapat dilihat dari konsentrasi ekonomi, alokasi sumber daya, pusat pemasaran, pusat pemerintahan dan nilai-nilai sosial politik. *Over Urbanisation and urban primacy* adalah merupakan masalah yang dirasakan oleh kota dimana menimbulkan masalah yang mempengaruhi perkembangan suatu kota, adapun masalah-masalah yang dapat ditimbulkan antara lain :

a. Pengangguran

Hal ini merupakan masalah yang cukup serius yang banyak dihadapi oleh kota-kota besar. Masalah ini timbul berkaitan dengan terjadinya *over urbanization*. Karena sebagian migran yang masuk ke kota tidak memiliki keterampilan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, maka para migran tersebut kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh kasar secara temporer (sektor informal).

b. Perumahan / Permukiman Kumuh

Salah satu karakteristik kota adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk,

²⁶ Wawancara tokoh masyarakat di Kawasan Industri Teluk Jamei Mei 2018

dimana kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan tidak seimbangnya antara ruang dan jumlah penduduk, sehingga masalah permukiman merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan oleh *over urbanization*.

c. Transportasi / Lalu Lintas

Sarana transportasi diperkotaan dapat menimbulkan masalah apabila jumlah kendaraan tidak seimbang dengan panjang jalan yang ada. Rasio jumlah kendaraan dan panjang jalan menentukan terjadinya masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran-pelanggaran dan tingginya tingkat angka kecelakaan lalu lintas.

Kepadatan lalu lintas ini menurut Sadono Sukirno dalam Khairuddin (199:220), menimbulkan beberapa jenis biaya sosial dan ekonomi pada masyarakat :

1. Mempertinggi tingkat kecelakaan
2. Mempertinggi biaya pemeliharaan kendaraan karena penggunaan minyak yang lebih banyak dan mempercepat kerusakan kendaraan
3. Mempertinggi ongkos pengangkutan
4. Menimbulkan masalah pencemaran udara yang serius.

d. Degradasi Moral dan Kejahatan

Masyarakat kota mempunyai ciri-ciri heterogenitas yang tinggi dan satu sama lain kurang/tidak saling mengenal. Hal ini akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dan semakin lemahnya kontrol sosial. Kondisi ini akan menyebabkan sikap individu lebih bebas untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri meskipun itu sudah bersifat deviasi atau menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku. Tindakan patologis semakin besar dengan besarnya pula *permissiveness* terhadap

penyimpangan yang dilakukan anggota-anggota masyarakat. Sikap menegur dan memberi nasehat bagi sebagian orang sudah dianggap mencampuri urusan orang lain, sehingga sangat jarang timbul reaksi dari masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran moral tersebut,

Kejahatan adalah suatu tindakan yang kalau boleh dikatakan sifatnya sangat klasik, dari zaman dahulu orang sudah mengenal tindak kejahatan dengan segala bentuknya, yang mungkin berbeda dari zaman ke zaman adalah kapasitas kejahatan, tindak kejahatan dari hari kehari semakin bervariasi dan sudah mengarah kepada tindakan sadisme, hal ini terutama terjadi pada kota-kota besar sebab lemahnya kontrol sosial dari kalangan masyarakat, sehingga semakin sulit untuk memberantasnya²⁷. Sebagaimana diketahui wilayah Kabupaten Karawang memiliki angka kriminalitas tertinggi di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014²⁸.

2. Upaya dan strategi apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan kawasan industri yang tidak rentan terhadap mobilisasi penduduk dan tenaga kerja serta akulturasi

Kepadatan penduduk Karawang saat ini sudah bisa dirasakan secara kasat mata. Jalan-jalan protokol selalu macet tanpa mengenal waktu. Demikian juga, ribuan warga selalu terlihat memadati pusat-pusat industri dan perdagangan. pertumbuhan penduduk

²⁷<https://masalah-urbanisasi-di-karawang-jawa.html> diunduh tanggl 22 Juli 2017

²⁸ www.antaraneews.com/berita/472163/karawang-kota-tertinggi-angka-kriminalitas-di-jabar

²⁸ Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat pendatang, juli 2018

Karawang hasil urbanisasi hampir sebanding dengan pertumbuhan penduduk alami (angka kelahiran)²⁹.

Pertambahan penduduk dalam setahun di daerah lumbung padi itu mencapai 3,6 persen atau setara dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah ibu kota. penambahan penduduk terbesar masih berasal dari pertumbuhan alami atau kelahiran bayi yang mencapai 60.019 orang pada tahun 2017. Sementara penambahan penduduk yang berasal dari warga pendatang (urban), pada tahun yang sama hanya tercatat 15.489 orang. Namun demikian, penambahan penduduk dari warga pendatang diyakini Eka, dua kali lipat dari angka tersebut. Sebab, banyak warga pendatang yang tidak melapor kepada aparat terkait ketika mereka pindah dan tinggal di Kabupaten Karawang. warga pendatang yang tidak melapor itu awalnya hanya coba-coba tinggal di Karawang. Namun akhirnya mereka menetap di Kota Pangkal Perjuangan karena mendapatkan penghidupan lebih baik dibanding di kampung halamannya. Warga pendatang itu kemudian beranak pinak di Karawang tetapi mereka tetap menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) daerah asalnya. Hal itu mereka lakukan karena kampung halamannya tidak terlampau jauh dari Karawang, seperti Subang dan Indramayu³⁰.

Laju pertumbuhan penduduk dari kaum urban ini pada dasarnya yang tidak bisa dikendalikan. Sebab, tidak ada larangan bagi warga Indonesia untuk tinggal dan mencari penghidupan di suatu daerah. warga yang

datang ke Karawang rata-rata berusia produktif. Mereka memang sengaja mengadu untung di daerah yang tengah berkembang menjadi kota besar tersebut.

Beberapa upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang antara lain³¹ :

1. Pembentukan Ikatan Penulis dan Pemerhati Kependudukan (IP2K) di Karawang. IP2K nantinya akan diisi oleh pelbagai penulis dan pemerhati yang peduli terhadap peradaban mendatang, terlebih saat ini permasalahan yang diakibatkan tidak terkontrolnya pengendalian penduduk khususnya di Karawang kian semakin kompleks.
2. Membentuk Kampung Keluarga Berencana, diharapkan dapat mengurangi dan mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Karawang
3. Optimalisasi Operasi yustisi ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pendatang tentang administrasi kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang.
4. Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. Merumuskan kembali peraturan teknis Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan yang isinya mewajibkan perusahaan di Karawang menerima lebih banyak pekerja asal Karawang.

Sementara untuk lebih meningkatkan kerukunan antar penduduk pendatang dan

²⁹ Keterangan Kepala Seksi Kependudukan Disdukcapil, 2018

³⁰ Ibid31

³¹ Diolah dari berbagai sumber , 2018

pribumi terutama di kawasan industri telah ada forum masyarakat peduli karawang yang senantiasa berupaya memelihara kerukunan antar masyarakat terutama di kawasan Industri KIIC Telukjambe.

Sebagaimana dituturkan oleh salah seorang tokoh masyarakat di kawasan industri teluk jambe, keberadaan masyarakat pendatang juga memiliki implikasi positif diantaranya adalah :

1. Menularkan etos bekerja keras bagi penduduk asli karawang
2. Meningkatkan pendapatan penduduk sekitar kawasan industri dengan banyak dibangunnya rumah sewa
3. Melahirkan budaya baru yaitu solidaitas yang tinggi sesama pekerja dan penduduk³²

Denghan demikian dapat dipahami bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang lebih diakibatkan oleh pergeseran pendudukan baik dari daerah sekitarnya maupun dari desa-desa di wilayah Kabupaten Karawang, meski berimplikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan penduduk namun juga secara kultural dapat berimplikasi positif sebagaimana dikemukakan diatas, dan proses akulturasi berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semangat bekerja para pekerja di kawasan industri.

KESIMPULAN

1. Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia telah melahirkan fenomena tingkat urbanisasi atau mobilitas penduduk yang tinggi baik

dari luar daerah Kabupaten Karawang maupun dari desa-desa di Karawang.

2. Melahirkan implikasi terhadap cepatnya laju pertumbuhan penduduk; angka kriminalitas dan semakin terbatasnya sarana prasarana penduduk seperti perumahan dan fasilitas umumlainnya.
3. pemerintah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai implikasi negatif terebut antara lain dengan menggagas Pembentukan Ikatan Penulis dan Pemerhati Kependudukan (IP2K) di Karawang. IP2K nantinya akan diisi oleh pelbagai penulis dan pemerhati yang peduli terhadap peradaban mendatang, terlebih saat ini permasalahan yang diakibatkan tidak terkontrolnya pengendalian penduduk khususnya di Karawang kian semakin kompleks;
4. Membentuk Kampung Keluarga Berencana, diharapkan dapat mengurangi dan mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Karawang;
5. mengoptimal Operasi yustisi ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pendatang tentang administrasi kependudukan
6. Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan ;
7. Merumuskan kembali peraturan teknis Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan yang isinya mewajibkan perusahaan di Karawang menerima lebih banyak pekerja asal Karawang.
8. Banyaknya urban atau mobilitas penduduk di wilayah Kabupaten

³² Wawancara denga tokoh masyarakat urban, Juni 2018

Karawang terutama di berbagai kawasan industrinya juga memberikan implikasi positif berupa akulturasi budaya yang positif diantaranya penularan etos bekerja keras bagi penduduk asli karawang ;

9. peningkatan pendapatan penduduk sekitar kawasan industri dengan banyak dibangunnya rumah sewa dan; melahirkan budaya baru yaitu solidaritas yang tinggi sesama pekerja dan penduduk.

SARAN

1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode mix method sehingga rasionalitas dari hasil penelitian selain dapat terdeskripsikan juga dapat terukur dan memudahkan dalam membangun sintesa yang dapat secara praktis dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan kependudukan dan implikasinya tentunya dengan teori dan tools od analisis yang lebih mutakhir.
2. Agar dilakukan registrasi penduduk secara rutin oleh stake holder di Kabupaten Karawang sehingga bisa diidentifikasi mana penduduk yang tetap dan tidak tetap

3. Mekanisme pembuatan kartu penduduk sementara harus dioptimalkan untuk penertiban administrasi kependudukan di wilayah kabupaten Karawang terutama di berbagai kawasan industrinya
4. Operasi yustisi perlu dilakukan secara rutin dan dapat melahirkan output berupa data dan evaluasi pengendalian kependudukan di Kabupaten Karawang
5. Penyuluhan dan pendataan administrasi kependudukan perlu dilakukan di kawasan-kawasan indusri melalui kerjasama antara dinas kependudukan dengan manajerial kawasan industri
6. Perlu dibentuk lembaga kerukunan dan solidaritas di setiap kawasan industri sehingga akulturasi dapat terkonstruksikan secara institusional
7. Perlu dirumuskan kebijakan dan pengendalian khusus tentang administrasi kependudukan di kawasan industri.
8. Merumuskan kembali peraturan teknis Peraturan Daerah Karawang Nomor 1 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan yang isinya mewajibkan perusahaan di Karawang menerima lebih banyak pekerja asal Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abustam, M.Idrus.2001.Mobilitas Tenaga Kerja dan Transformasi Sosial Ekonomi .Rineka.
Cipta. Bayu Dibyantoro, M. M. 2014

- Achmad Djunaedi, Sudaryono, 2015. Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta, *jurnal of regional of city planing ITB* volume 6 nomor 23
- Afrianto, E dan E, Liviawaty, 1989. *Mobilitasdi negara-negara sedang berkembang*, Kanisius Yogyakarta
- Alan S. Burger, 2008 *Pengertian Kota diterjemahkan oleh. (Dyayadi)* Jakarta : Rineka Cipta.
- Amos Rapoport(2011) *KOTA PENGERTIAN KLASIK dan MODERN* oleh Hestin Mulyandari **Penerbit**. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Arnold Tonybee, *Sejarah Umat Manusia 2017* , Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2016. *Kabupaten Karawang dalam Angka. 2016..*
- Barlowe, R. 1978. *Land Resorce Economics*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
- Bintaro, 2013, *Pengertian Kota Dari Segi Geografis*, Jakarta : Penerbit LP3ES
- Connel, D.W. and, G.J. Miller. , 1995 *Akuakulturasi Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor 2004.
- Eny & Tugiyono. 1986. *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Karawang*. Penerbit Pustaka Dian. Jakarta.
- Edward III, George. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington. Bumi Aksara : Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti dan Makna Mobilisasi* Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2008
- Koentjaraningrat. 1990. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto, M. Ngalim. 2009, *Manusia Dalam Lingkungannya Bandung: Remaja*. Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013, . *Analisis Data Kualitatif* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Soeling 2007, *Pertumbuhan ekonomi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Birokrasi Bisnis Bandung: Alfabeta. Supranto, J. (2001).
- Northamn, 2008, *Struktur Tata Ruang Kota* Penerbit. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- (UNIDO), (1978:6) *Kawasan Industri Berwawasan lingkungan*. Jakarta Penerbit, : Rekayasa Sains
- Rustiadi, E., Sunsun., Dyah. 2001. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Penerbit Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Republik Indoensia, 1992. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang : Penataan Ruang _____, 2007 Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang. Penataan Ruang _____ Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

_____, 1996. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri
Pemerintah Kabupaten Karawang, 2004. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang
_____, 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karawang
_____, 2016 Kabupaten Karawang dalam angka
_____, 2017 Kabupaten Karawang dalam angka

C. Internet

www.bplh.karawangkab.go.id/.../5.-Perda-No.-02-Tahun-2013-RTRW-Tahun-2011.
didownload pada tanggal 3 Maret 2018

www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl52198/parent/26897 didownload pada
tanggal 3 Maret 2018

tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/keppres/keppres_41_1996 didownload pada tanggal 3
Maret 2018

<https://masalah-urbanisasi-di-karawang-jawa.html> diunduh tanggal 22 Juli 2017

www.antaranews.com/berita/472163/karawang-kota-tertinggi-angka-kriminalitas-di-jabar
diunduh tanggal 22 Juli 2017.